



Danais untuk Dua Urusan Keistimewaan

Pemkot Perketat Pantauan Penggunaan Anggaran

JOGJA - Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengelola dana keistimewaan (Danais) sebesar Rp 34,4 miliar. Berbeda dengan 2014, pada tahun ini kuasa pengguna anggaran tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tahunnya sebelumnya hanya terpusat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota

Jogja Edy Muhammad mengatakan, pada 2015 ini danais yang dikelola Pemkot Jogja untuk dua urusan keistimewaan, yaitu untuk kebudayaan, dan tata ruang. "Untuk urusan kebudayaan, total dana keistimewaan yang dikelola Rp 29,916 miliar. Sedangkan untuk urusan tata ruang, Rp 4,5 miliar," kata Edy kemarin (23/1).

Dijelaskan, untuk urusan kebudayaan, terdapat empat program. Pertama pengembangan nilai budaya sebesar Rp 9,4 miliar yang dikelola oleh Dinparbud dan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) untuk Pa-

sar Malam Perayaan Sekaten (PMPS).

Kedua, program pengelolaan kekayaan budaya sebesar Rp 11,59 miliar, terbagi dalam tiga SKPD, yaitu Dinparbud, Bagian Tata Pemerintahan, dan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil).

Ketiga, program pengelolaan keragaman budaya sebesar Rp 8,1 miliar yang dikelola Dinparbu. Keempat, program kerja sama pengelolaan kekayaan budaya sebesar Rp 750 juta yang dikelola Dinparbud.

Sementara untuk urusan tata ruang, terbagi dalam dua program, yaitu

penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan sebesar Rp 3 miliar di bawah UPT Malioboro. "Juga untuk pengembangan transportasi berbasis keistimewaan bagi pengguna sepeda di kawasan sumbu filosofis dan Kotabaru sebesar Rp 1,5 miliar di bawah dinas perhubungan," terangnya.

Menurut Edy, pihaknya sudah melibatkan SKPD terkait sejak usulan perencanaan. Dengan melibatkan SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Edy berharap, pemanfaatan danais tahun ini bisa lebih optimal, sehingga pemberian

manfaat ke masyarakat lebih terasa. "Sejak DIPA diserahkan, sudah bisa langsung menyiapkan pengerjaan," tuturnya.

Untuk pengawasan, Edy berencana melibatkan SKPD yang memiliki tupoksi pengawasan dan pengendalian di tingkat Kota Jogja. Seperti Bagian Pengendalian Pembangunan, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) hingga Inspektorat Kota Jogja. "Dengan melibatkan SKPD yang memiliki tupoksi pengawasan ini, diharapkan dalam pelaksanaan bisa lebih baik," terangnya.

Pengawasan penggunaan danais 2015, juga akan dilakukan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja. Di antaranya dengan melakukan pemantauan secara khusus atas penggunaan danais, agar sesuai peruntukannya. Forpi Kota Jogja mendorong dalam pengelolaan danais mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

"Mulai dari perencanaan anggaran dan program kegiatan, hingga pada pelaporan penggunaan anggaran secara berkala," ujar koordinator Forpi Winarta. (pra/jko/ty)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 03 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005